

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris, yang memiliki makna bahwa sektor pertanian memiliki peran yang penting dalam menunjang perekonomian secara nasional. Sektor pertanian merupakan sektor pengganda pendapatan (*multiplier effect*) yang memiliki nilai pendapatan lebih tinggi dibanding sektor lainnya. Tanaman pangan termasuk ke dalam produk utama sektor pertanian di Indonesia. Keanekaragaman dan melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki menjadi penopang dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Ketahanan pangan termasuk salah satu faktor pendukung pembangunan nasional yang terdiri dari kesatuan sistem ekonomi pangan yaitu ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Pemenuhan akan ketersediaan pangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas memiliki peran yang signifikan sebagai dasar seutuhnya dalam pembangunan jangka panjang, dikarenakan terpenuhinya ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat merupakan salah satu faktor penentu dalam mewujudkan ketahanan pangan secara nasional.

Menurut Badan Ketahanan Pangan (2020), ketahanan pangan memiliki definisi yakni sebagai kepentingan negara untuk memenuhi kebutuhan pangan individu, yang dapat diamati dari ketersediaan pangan yang memadai, aman secara kuantitatif dan kualitatif, bergizi, beragam, adil dan murah serta tidak menentang dengan agama dan keyakinan, serta budaya masyarakat untuk memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan aktif secara berkelanjutan. Terdapat tiga pilar utama dalam konsep ketahanan pangan yaitu keberadaan, keterjangkauan dalam hal fisik dan keuangan, dan kestabilan. Ketiga aspek ini harus tersedia dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Menurut FAO (1992), dimensi ketahanan pangan terdiri atas empat pilar yakni ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan. Keempat indikator tersebut menggambarkan berbagai aspek yang terdiri dari penawaran, permintaan, distribusi, penggunaan dan upaya menjaga stabilitas harga produk pangan (Sari, 2018).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya ketahanan pangan terdiri atas beberapa pilar, yakni: (1) pilar ketersediaan pangan yang cukup, yang dapat dipenuhi oleh produksi dalam dan luar negeri, (2) ketersediaan pangan yang terjangkau, yang tercermin dari kemampuan ekonomi masyarakat untuk memperolehnya (3) pemanfaatan pangan, (4) dan kestabilan pangan yang dapat dilihat dari kontinuitas suplai atau ketersediaannya dari waktu ke waktu. Untuk menjaga ketahanan pangan secara nasional, terdapat empat pilar dalam ketahanan pangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan terpenuhinya empat pilar ketahanan pangan tersebut, maka masyarakat atau rumah tangga akan mampu untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pangannya sendiri.

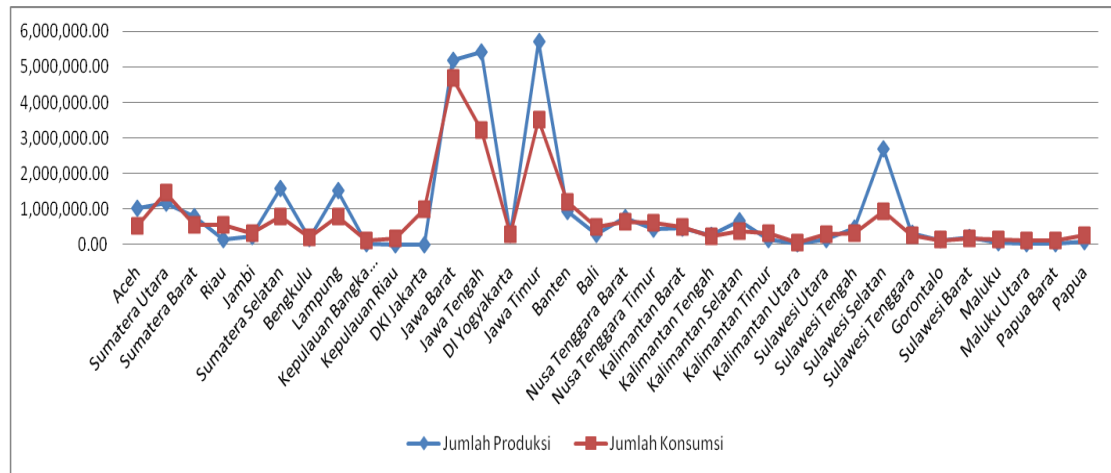
Menurut teori Robert Malthus, kebutuhan pangan mengikuti perkembangan geometris atau deret ukur, sedangkan ketersediaan pangan akan mengikuti aritmatika atau deret hitung. Pada suatu periode tertentu, laju pertumbuhan penduduk yang akan meningkatkan kebutuhan pangan, tidak akan bisa mengimbangi ketersediaan pangan (Pratama, Sudrajat, & Harini, 2019). Mempertimbangkan teori tersebut, maka perlu adanya keseimbangan antara kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan pada setiap provinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerah, memiliki kapasitas akan Sumber Daya Alam (SDA) yang beragam untuk memenuhi ketersediaan pangan yang dipengaruhi oleh letak geografis. Distribusi akan pangan yang merata dapat diwujudkan dengan pemenuhan pilar-pilar ketahanan pangan yang telah disebutkan diatas. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui penilaian kriteria tertentu yang dapat mempengaruhi setiap provinsi dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Komoditi beras merupakan komoditi utama yang memiliki peran penting sebagai penunjang ketahanan pangan. Beras merupakan salah satu komoditas pangan utama, dimana setengah dari populasi di dunia menganggap beras sebagai makanan pokok utama. Dalam konteks ini, sekitar 90 persen konsumsi beras berada di Asia, dan lebih dari 22 persen dikonsumsi oleh penduduk di Asia Tenggara. Menurut data dari *United States Department of Agriculture (USDA)*, China merupakan negara dengan konsumsi beras terbesar di Asia, diikuti oleh India, Vietnam, dan Bangladesh. Indonesia menempati peringkat kelima dengan

konsumsi beras per kapita tahunan mencapai 135 kg, melebihi angka Filipina (115 kg), Thailand (99 kg), dan Malaysia (81 kg). Komoditi beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia karena beras termasuk sumber kalori utama dengan rata-rata 90% dari total penduduk di Indonesia mengonsumsi beras. Menurut SUSENAS (2021), rata-rata konsumsi kalori perkapita per hari di Indonesia adalah 2.143,21 kalori, yang bersumber dari beberapa kelompok bahan makanan namun beras tetap memberikan kontribusi paling besar yaitu 814,05 kalori (Arifin, 2021).

Pemenuhan ketersediaan beras memiliki kondisi yang beragam di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Kriteria dari setiap penilaian untuk ketersediaan beras yang menjadi penyangga dalam memenuhi ketahanan pangan setiap provinsi saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ketahanan pangan harus melibatkan aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Ketersediaan pangan khususnya komoditi beras memiliki peran penting dalam memastikan pasokan pangan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh populasi, termasuk dalam hal jumlah yang memadai, kualitas yang baik, variasi yang mencukupi, dan keamanan pangan yang terjamin. Dalam hal pemenuhan ketersediaan beras untuk mencukupi kebutuhan konsumsi, Indonesia memiliki upaya dengan cara peningkatan produksi dan impor beras, hal ini dilakukan untuk menjaga agar beras dapat diakses secara merata oleh seluruh provinsi.

Menurut teori H-O yang dikemukakan oleh Heckscher dan Ohlin dalam perdagangan internasional, adanya perbedaan produktivitas antar negara dipengaruhi oleh jumlah dan proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Perbedaan ini akan mempengaruhi harga barang yang dihasilkan pada akhirnya. Negara yang memiliki lebih banyak faktor produksi akan cenderung melakukan ekspor barang, sementara negara dengan faktor produksi yang lebih sedikit akan melakukan impor untuk memenuhi kebutuhannya. Pemerintah menerapkan kebijakan impor sebagai respons terhadap selisih antara produksi dan ketersediaan beras di Indonesia (Sari, 2018).



Sumber : (Kementerian Pertanian , 2021)

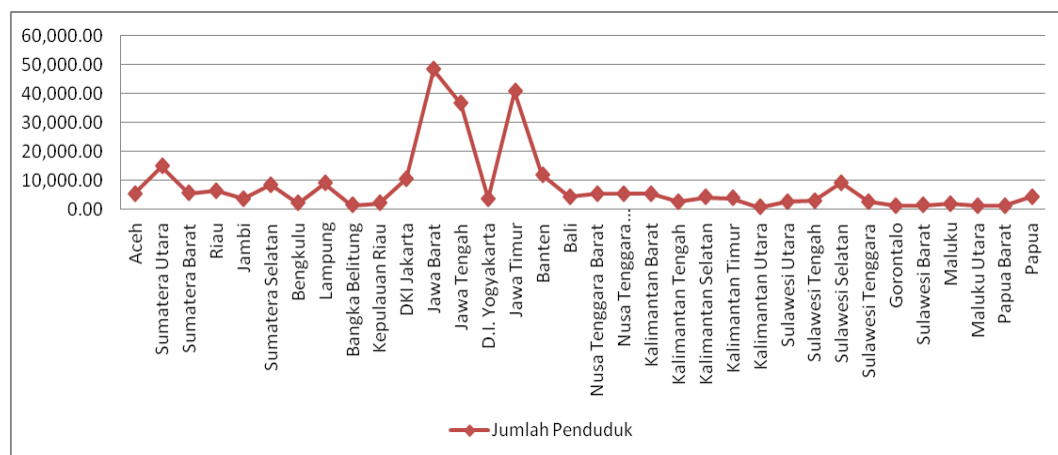
### Grafik 1. Jumlah Produksi dan Konsumsi Beras 34 Provinsi di Indonesia (Ton)

Kriteria penilaian akan ketersediaan beras di setiap provinsi yang dimaksud dalam penelitian ini, pertama dapat dilihat melalui jumlah produksi dan konsumsi beras. Pilar dalam ketahanan pangan menurut FAO (1992) salah satunya adalah *food availability* yang dapat dipenuhi melalui jumlah produksi pangan dan stok pangan. Dalam memenuhi pilar tersebut, pemerintah melakukannya dengan cara peningkatan produksi dalam negeri. Jika dilihat dari grafik diatas, dapat dikatakan bahwa jumlah produksi beras selalu berada diatas rata-rata jumlah konsumsi. Pada tahun 2020, jumlah produksi padi yang dihasilkan dan dikonversikan menjadi beras untuk siap dikonsumsi oleh penduduk setara dengan 31,33 juta ton beras yang mengalami peningkatan sebanyak 21,46 ribu ton (0,07%) yang apabila diperbandingkan dengan jumlah produksi beras pada tahun 2019, terdapat surplus yang mencapai 2,13 juta ton.

Pulau Jawa menyumbang produksi beras terbesar di Indonesia dengan persentase mencapai 56.03% dari total produksi secara nasional. Adapun provinsi yang termasuk ialah Jawa Timur dengan jumlah produksi beras sebesar 5,71 juta ton (18%), Jawa Tengah 5,43 juta ton (17%), dan Jawa Barat 5,18 juta ton (16%). Provinsi di luar jawa yang juga menghasilkan produksi terbesar yaitu Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan dengan jumlah produksi beras sebesar 2,68 juta ton

(8%), dan 1,56 juta ton (5%). Secara umum, provinsi yang tergolong kedalam surplus beras memiliki rata-rata selisih diatas 1 juta ton.

Pulau yang berada di bagian timur Indonesia yaitu Pulau Papua dan Maluku menjadi daerah yang jumlah produksi dan konsumsi beras berada di posisi rendah, hal ini dikarenakan adanya keanekaragaman (diversifikasi) pangan, dimana sebagian penduduk di daerah tersebut menggunakan sagu sebagai makanan pokok, dengan kurang lebih 30% penduduk Maluku mengkonsumsi sagu, dan 20% di Pulau papua penduduknya juga mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok (Umanilo, 2019). Keanekaragaman (diversifikasi) pangan tersebut juga disebabkan oleh keadaan alam yang ikut mendukung dimana daerah dengan penghasil beras berada di wilayah geografis dengan gunung api aktif yang mampu menghasilkan unsur hara yang cukup kepada tanaman padi untuk tumbuh, selain itu ketersediaan air untuk irigasi persawahan dapat terpenuhi dengan baik di wilayah pulau yang luas dibandingkan dengan provinsi di pulau kecil lainnya.



Sumber : (Badan Pusat Statistik , 2020)

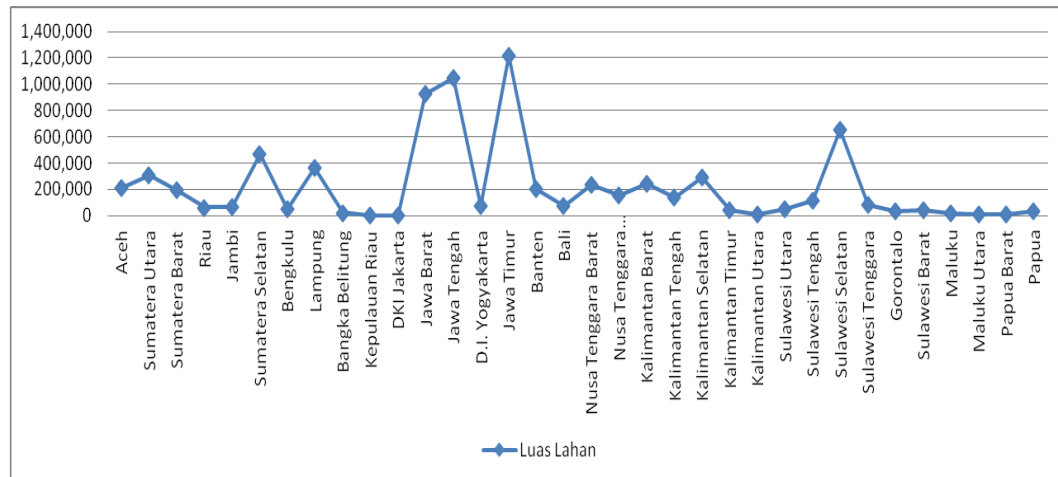
## Grafik 2. Jumlah Penduduk 34 Provinsi di Indonesia (Jiwa)

Kriteria penilaian akan ketersediaan beras di setiap provinsi juga dapat dilihat melalui jumlah penduduk. Keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan beras merupakan hal yang perlu diperhatikan dikarenakan adanya perbedaan pemenuhan konsumsi setiap daerah. Dalam menjaga keseimbangan tersebut, faktor yang paling mempengaruhi adalah jumlah penduduk. Permintaan konsumsi beras akan meningkat sejalan dengan penambahan jumlah penduduk.

Jika dilihat dari grafik diatas, Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak yang mencapai 56.10% dari total penduduk secara nasional. Adapun Provinsi Jawa Barat merupakan penyumbang populasi terbesar dengan jumlah penduduk mencapai 48,27 juta jiwa (18%), diikuti dengan Provinsi Jawa Timur 40,66 juta jiwa (15%), dan Provinsi Jawa Tengah 36,51 juta jiwa (13%). Pada posisi selanjutnya, Pulau Sumatera memiliki jumlah penduduk yang mencapai 22% dari total penduduk secara nasional. Jumlah penduduk di Pulau Maluku dan Papua merupakan jumlah penduduk yang paling terendah di Indonesia yakni hanya 8,56 ribu jiwa atau 3% dari total penduduk secara nasional.

Kondisi ini memberikan perbedaan akan kebutuhan beras dan ketersediaan beras antar provinsi di Indonesia. Pulau Jawa, yang merupakan pusat kegiatan dan pemerintahan, memiliki kebutuhan beras yang paling besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa dengan perbedaan selisih jumlah yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi penduduk yang tinggi di Pulau Jawa, di mana kebutuhan akan beras secara otomatis juga akan mengalami peningkatan. Distribusi yang merata menjadi peran penting dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan konsumsi beras, sehingga daerah yang potensial untuk menghasilkan produksi padi dapat lebih berkembang dan daerah yang tidak berpotensi mengembangkan padi dapat mengembangkan potensi komoditas pangan lain yang sesuai, dengan tujuannya untuk mencegah adanya ketimpangan dalam distribusi pangan.

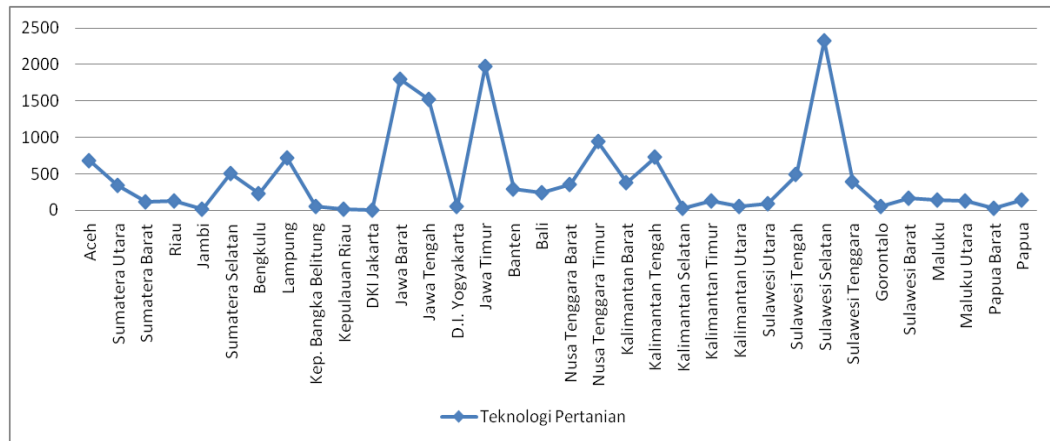
Hasil penelitian (Pratama, Sudrajat, & Harini, 2019) mengatakan bahwa Pertambahan jumlah penduduk tidak hanya berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan pangan. Hal ini karena peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan permintaan yang lebih tinggi terhadap lahan pemukiman, yang pada gilirannya dapat menyebabkan konversi lahan pertanian. Akibatnya, luas lahan pertanian akan berkurang, dan hal ini berpotensi mempengaruhi jumlah produksi pangan. Adanya ahli fungsi lahan akan mempengaruhi produktivitas petani dalam optimalisasi produksi beras. Menurut Badan Pertanahan Nasional, setiap tahun terjadi konversi lahan sawah yang mencapai 100.000 hektare dari lahan sawah yang ada di Indonesia.



Sumber : (Kementerian Pertanian, 2020)

### Grafik 3. Luas Lahan Sawah 34 Provinsi di Indonesia (hektare)

Kriteria penilaian akan ketersediaan beras di setiap provinsi selanjutnya dapat dilihat melalui luas lahan sawah. Berdasarkan grafik diatas, total luas lahan sawah di Indonesia memiliki luas sebesar 7,46 juta hektare (ha). Jika dilihat berdasarkan wilayah yang ada di Indonesia, Pulau Jawa menjadi pulau dengan luas lahan sawah terluas di Indonesia. Luas lahan sawah yang ada di Pulau Jawa mencapai 3,47 juta ha yang mencapai 46% dari total keseluruhan secara nasional. Adapun Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan luas lahan paling luas di Indonesia dengan luas lahan 1,21 juta ha atau setara 16% , diikuti dengan Provinsi Jawa Tengah dengan luas lahan 1,04 juta ha atau setara 14%, dan posisi ketiga yaitu Provinsi Jawa Barat dengan luas lahan 928,21 ribu ha atau setara 12%. Pada posisi selanjutnya ada Pulau Sumatera yang memiliki jumlah luas lahan mencapai 1,75 juta ha atau 23% dari luas lahan secara nasional. Di pulau ini, Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas lahan terbesar, yakni 27% dari luas lahan di Pulau Sumatera. Di urutan selanjutnya, ada Pulau Sulawesi dengan luas lahan mencapai 973,34 ribu ha (13%), diikuti Pulau kalimantan dengan luas lahan 724 ribu ha (10%), serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan luas lahan 461 ribu ha (6%). Luas lahan di Pulau Maluku dan Papua merupakan luas lahan yang paling terendah di Indonesia yakni hanya 77 ribu ha atau 1,03% dari jumlah luas lahan sawah keseluruhan secara nasional.

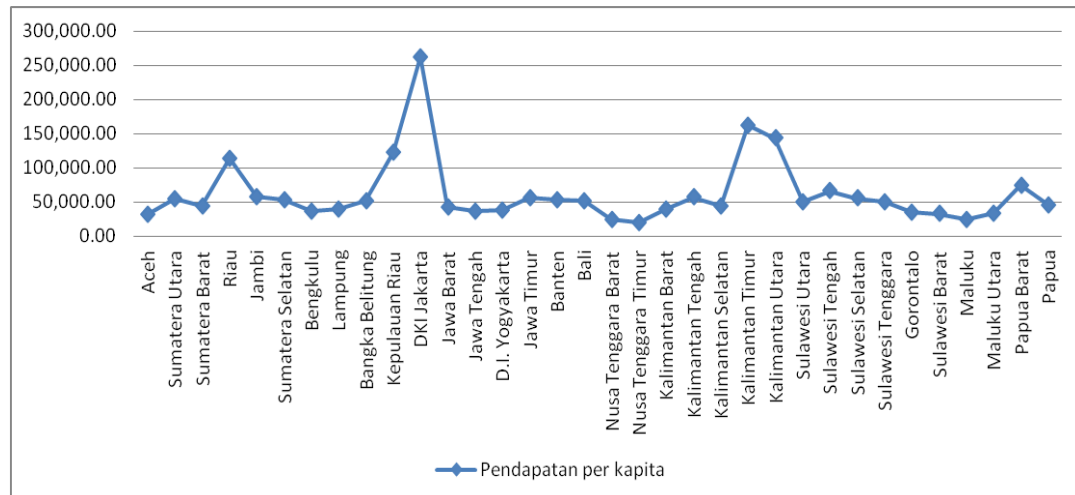


Sumber: (Kementerian Pertanian, 2021)

#### Grafik 4. Jumlah Teknologi Pertanian 34 Provinsi di Indonesia (Unit)

Kriteria penilaian akan ketersediaan beras di setiap provinsi juga dapat dilihat melalui perkembangan teknologi pertanian. Konsep perubahan teknologi mengacu pada penemuan dan adopsi teknologi tertentu karena dengan perubahan ini dapat menggeser fungsi produksi ke atas. Perubahan teknologi dapat diklasifikasikan sebagai hemat-lahan atau hemat-tenaga kerja (*land saving or labor saving*). Input hemat lahan biasanya direpresentasikan oleh penggunaan input biologi kimiawi, seperti meningkatkan output per total area atau produktivitas lahan dengan penggunaan benih, pupuk, insektisida, dan irigasi yang lebih baik. Sementara input hemat tenaga kerja biasanya direpresentasikan oleh alat dan mesin pertanian, seperti traktor, yang meningkatkan rasio tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja (Bustanul, 2020). Dalam hal ini, jumlah teknologi pertanian dapat dilihat dari jumlah distribusi bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) setiap provinsi. Jika dilihat dari grafik diatas, provinsi dengan bantuan alsintan terbanyak diraih oleh Sumatera Selatan dengan jumlah alsintan mencapai 2.330 unit. Penggunaan alsintan tersebut telah mampu menghasilkan 4,7 juta ton beras pada tahun 2020. Adapun provinsi dengan penghasil produksi beras terbanyak yaitu Jawa Timur mendapatkan bantuan alsintan sebanyak 1.977 unit, diikuti dengan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.526 unit.

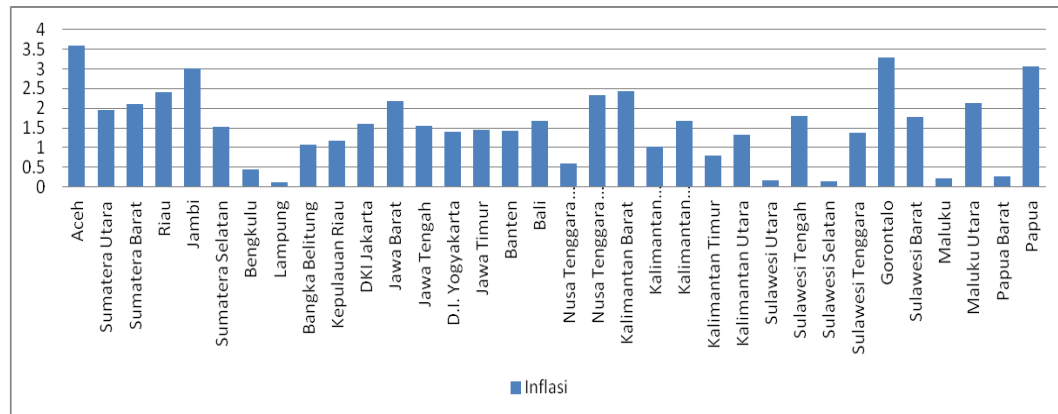




Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

### Grafik 5. PDRB per Kapita 34 Provinsi di Indonesia (Rp)

Kriteria penilaian akan ketersediaan beras di setiap provinsi selanjutnya dapat dilihat melalui tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dikarenakan PDRB per kapita termasuk salah satu indikator untuk mengetahui tingkat perekonomian dari setiap daerah melalui rata-rata pendapatan penduduk yang ada di daerah tersebut. Konteks ini searah kepada salah satu pilar ketahanan pangan menurut FAO (1992) adalah *food acces* yang ditentukan oleh daya beli dan pendapatan masyarakat, dengan melihat PDRB per kapita, dapat ditentukan tingkat kemampuan setiap provinsi dalam mencukupi kebutuhan pangannya. Pada tahun 2020 total PDRB per kapita secara nasional mencapai Rp56,9 Juta. Tingkat PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta memiliki peringkat paling tinggi secara nasional. Hal ini bisa diketahui PDRB per kapita yang tercatat sebesar Rp262,61 juta, nilai tersebut bahkan lebih besar dari rata-rata pendapatan penduduk secara nasional pada tahun 2020. Provinsi yang berada di posisi teratas selain DKI Jakarta terdapat di Pulau Kalimantan yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan PDRB per kapita Rp161,8 juta dan Rp143,53 juta. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki PDRB per kapita sebesar Rp20,05 Juta, menjadikannya provinsi dengan PDRB per kapita terendah.

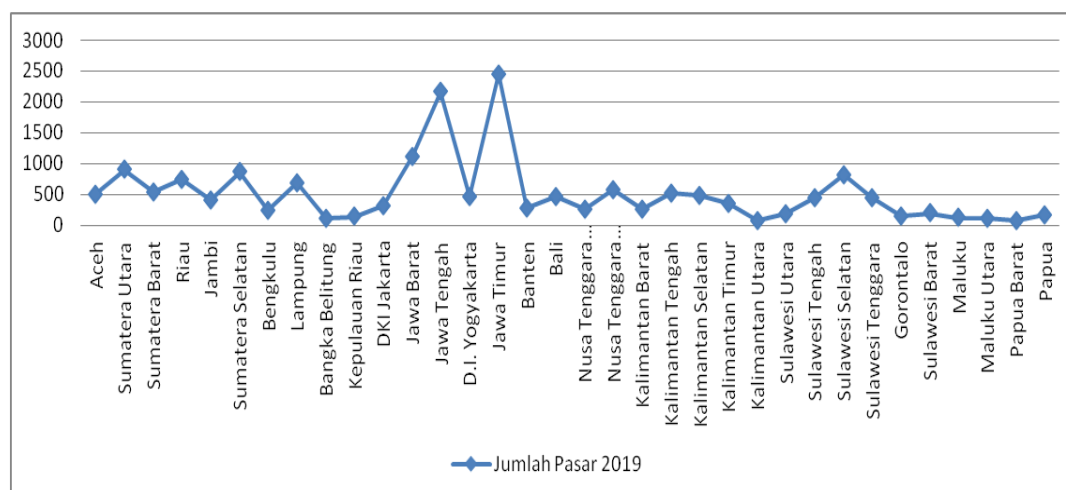


Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

### Grafik 6. Tingkat Inflasi 34 Provinsi di Indonesia

Kriteria penilaian akan ketersediaan beras di setiap provinsi selanjutnya dapat dilihat melalui tingkat inflasi. Dalam hal ketahanan pangan khususnya komoditi beras, inflasi digunakan untuk menjaga stabilitas harga pangan yang tercermin dari terkendalinya harga pangan secara umum di kalangan konsumen. Grafik di atas menunjukkan bahwa inflasi tahunan terendah tercatat di Pulau Bali Nusa Tenggara sebesar 0,72% yoy, diikuti oleh Pulau Kalimantan 1,37% yoy, Pulau Sulampua sebesar 1,47% yoy, Pulau Jawa 1,73% yoy, dan Pulau Sumatera 1,90% yoy.

Inflasi menurut kelompok bahan makanan menjadi peyumbang terbesar di tahun ini dengan tingkat inflasi yang mencapai 1,49%. Hal ini membuktikan bahwa fluktuasi harga pangan akan sangat mempengaruhi ketahanan pangan negara. Perubahan harga pangan dapat memberikan dampak yang besar terhadap laju inflasi, karena ketika permintaan akan bahan pangan menjadi cukup tinggi, namun terkadang penawaran atau pasokan belum cukup untuk memenuhi permintaan yang ada. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercukupinya permintaan antar daerah adalah kondisi cuaca yang tidak menentu dan gangguan hama pertanian yang memicu gagal panen dan otomatis menyebabkan produksi menurun. Kondisi ini juga didukung karena infrastruktur Indonesia yang masih belum merata perkembangannya, sehingga dapat menghambat jalur distribusi bahan pangan dan membuat harga mengalami kenaikan.



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

### Grafik 7. Jumlah Pasar 34 Provinsi di Indonesia

Kriteria penilaian akan ketersediaan beras di setiap provinsi selanjutnya dapat dilihat melalui distribusi jumlah pasar. Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan jumlah dan mutu pasokan pangan, tetapi juga terkait dengan kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya secara ekonomi dan kestabilan ketersediaannya dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan salah satu pilar ketahanan pangan dari FAO (1992) yaitu *food stability* yang berarti ketahanan pangan dapat dipenuhi apabila dapat diakses oleh masyarakat dan penggunaannya cukup sesuai kebutuhan. Salah satu akses yang menjadi penentu dari tercukupinya ketersediaan beras adalah jumlah pasar. Pasar berperan penting dalam penyediaan pangan sebagai perantara dalam peredaran ketersediaan pangan, dimana sebagian besar hasil pangan yang telah diproduksi atau didatangkan dari luar daerah sudah duluan tiba ke pasar sebelum tiba di tangan konsumen.

Akses atau keberadaan pasar memiliki keterkaitan dengan ketahanan dan ketersediaan pangan di suatu daerah selain dari kapasitas produksi akan pangan. Provinsi di Indonesia dengan jumlah pasar terbesar berada di Pulau Jawa dengan jumlah pasar yang mencapai 38,51% dari keseluruhan total di Indonesia. Pulau Sumatera berada di posisi kedua dengan angka 29,13% , diikuti dengan Pulau Sulawesi sebesar 12,7% dan Pulau Kalimantan sebesar 9,6%. Pulau Papua berada di posisi paling rendah dengan jumlah pasar 1,37%. Dari penjelasan di atas

Yura Marzani, 2023

ASSESSMENT KETERSEDIAAN BERAS PADA 34 PROVINSI DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

terlihat bahwa distribusi pasar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor produksi dan pasokan pangan, tetapi juga faktor lain seperti transportasi dan kondisi geografis daerah yang menjadi penyebab kurangnya akses pasar.

Pemenuhan akan ketersediaan beras dengan pola produksi dan pola konsumsi setiap daerah yang belum seimbang mengandung makna bahwa Distribusi pangan antar wilayah memiliki peranan penting dalam memastikan ketersediaan pangan yang beragam di semua wilayah sesuai dengan kebutuhan penduduk setiap saat. Hal ini meliputi aspek jumlah, kualitas, dan lokasi yang tepat. Distribusi pangan yang merata dapat diwujudkan dengan melihat daerah mana yang memiliki potensi terbaik agar dapat mengimbangi daerah lainnya yang tidak cukup potensial, sehingga dapat diketahui penyebab dari dilakukannya impor beras dalam memenuhi ketersediaan tersebut.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya seperti halnya yang disampaikan oleh (Saputra & Purnomo, 2022) dengan hasil variabel produktivitas lahan, harga beras berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Penelitian oleh (Septiadi & Joka, 2019), dengan hasil variabel pendapatan perkapita, harga beras, jumlah penduduk, produksi beras, dan Lag permintaan beras berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan beras di Indonesia. Penelitian oleh (Hasanah, 2022) dengan hasil variabel produksi beras, konsumsi beras, luas lahan, luas panen padi tidak mempengaruhi secara signifikan, dan variabel Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Impor beras di Indonesia. Berdasarkan latar belakang dari uraian yang ada di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “*Assessment Ketersediaan Beras Pada 34 Provinsi di Indonesia*”.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang telah disampaikan, bahwa beras memiliki peran penting dalam menjamin ketahanan pangan di Indonesia. Dalam mencapai hal tersebut, diperlukan keseimbangan antara kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan setiap provinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerah, memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan pangan yang dipengaruhi oleh letak geografis. Distribusi akan pangan yang merata dapat diwujudkan dengan pemenuhan pilar-pilar ketahanan pangan,

apabila hal tersebut tidak dapat terpenuhi dengan produksi dalam negeri dikarenakan adanya selisih antara jumlah produksi dan jumlah konsumsi, maka kebijakan impor dapat diterapkan untuk mengatasi hal tersebut dan mencukupi stok pangan di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Multi Criteria Decision Making* (MCDM) dengan *software* PROMETHEE dengan objek penelitian adalah 34 provinsi yang ada di Indonesia. Faktor ketersediaan beras berfungsi untuk menjamin pasokan beras yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, dan keamanannya serta dapat diakses secara merata oleh seluruh provinsi. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui variabel-variabel yang diduga sebagai kriteria penentu dalam memenuhi ketersediaan beras di setiap provinsi, dimana dengan penilaian tersebut, dapat diketahui urutan atau *outranking* dari setiap provinsi. Analisa ini akan melakukan *assesment* untuk mengetahui daerah mana yang mampu memenuhi ketersediaan beras melalui kemampuan daerahnya berdasarkan kontribusi dari setiap kriteria, dan daerah mana yang belum mampu, sehingga memerlukan kebijakan impor beras untuk memenuhi ketersediaan beras di daerahnya.

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan melakukan analisis terhadap fenomena yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara menyeluruh urutan atau *outranking* dari 34 provinsi di Indonesia yang memiliki nilai terbesar dan nilai terendah atas kriteria atau variabel yang telah ditentukan dalam memenuhi ketersediaan beras dengan melakukan pengukuran dari masing-masing daerah.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Berikut adalah beberapa manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini:

a. Manfaat Teoristis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan wawasan dan pengetahuan sebagai pijakan referensi dengan pembahasan mengenai *asesment* ketersediaan beras pada 34 provinsi di Indonesia menggunakan

metode penelitian *Multi Criteria Decision Making* (MCDM) dengan *software* PROMETHEE sebagai acuan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang ingin melaksanakan penelitian dengan topik serta masalah yang sama agar dapat terus memperbaharui data penelitian.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi dalam mengikuti kebijakan dari pemerintah yang berkaitan dengan ketahanan pangan.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menganalisis kebijakan mengenai kebutuhan pangan beras di setiap provinsi agar tidak terjadi ketimpangan dalam ketahanan pangan di Indonesia.